

**ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

RAHMI HAMDA SARI

06096047



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**





No. Alumni Universitas

Rahmi Hamda Sari

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl.Lahir: Koto Berapak, 21/09/1985 b). Nama Orang Tua: Syafnir, SP dan Sri Rahma Suryaningsih c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096047 f). Tgl.Lulus: 28 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3,58 i) Lama Studi : 32 bulan k) Alamat orang tua: Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Merak No. 07 Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan

Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Hubungannya dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)

Tugas Akhir DIV oleh Rahmi Hamda Sari.

Pembimbing 1. Wiwik Andriani, SE. Ak., 2. Zahara, SE., M.Ak., Ak

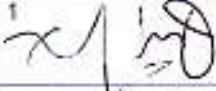

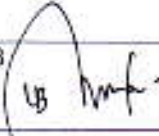
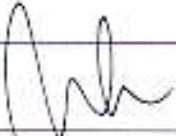
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi yang dimaksud adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan, sedangkan hal yang berkaitan dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 113 kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan yang memudahkan dalam menginterpretasikan hasil analisis lebih lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tugas Akhir telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Endrawati, SE., M. Kom., Ak	Elfritri Senti, SE., M. Kom., Ak	Arnel Yentita, SE. Ak	Wiwik Andriani, SE. Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE., MM., Ak
Nama

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan atas aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai. Apabila informasi bermanfaat bagi para pemakai hal ini berarti bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila berkaitan dengan pengambilan keputusan. Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dipahami, dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh pengguna.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan

keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berbagai tulisan yang ditemukan di beberapa media massa maupun internet menyatakan bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan belum disajikan tepat pada waktunya sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa tulisan di media massa menjelaskan adanya keterkaitan antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi pelaporan keuangan yang menyatakan bahwa tanpa dukungan tenaga akuntansi yang memadai maka pemerintah daerah tidak akan mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, sesuai sistem anggaran dan laporan keuangan yang berlaku. Tanpa tersedianya tenaga akuntan memadai, implementasi sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi akrual di lingkungan pemerintah daerah dapat diumpamakan memaksa seorang pilot helikopter menerbangkan pesawat besar. DKI Jakarta sendiri masih kekurangan sekitar 5.000 akuntan (Detik Finance, 17 November 2008). Selain itu, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah Bambang Wahyudi mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan pemerintah daerah buruk dalam membuat laporan keuangan. Pertama, sumber daya manusia yang ada tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kedua, penerapan sistem keuangan yang kurang bagus. Ketiga, adanya perubahan sistem anggaran dari anggaran berimbang dinamis menjadi anggaran berbasis kinerja. Menurut Bambang dari kelemahan tersebut, hampir semua pemerintah daerah belum siap membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca (Koran Tempo, 16 Januari 2009). Beberapa tulisan juga menyatakan adanya

keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Ketua BPK yang meminta agar pemerintah daerah melakukan penyusunan *'action plan'* secara maksimal dalam membuat laporan keuangan, memperbaiki pembukuan, penataan aset, peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi serta memaksimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait menurunnya kinerja laporan keuangan daerah dalam empat tahun terakhir (Antara News, 21 Agustus 2008).

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Beberapa penelitian mengenai sumber daya manusia pada pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis. Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas,

BAB LIMA

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum semuanya mempunyai kapasitas sumber daya yang memadai terlihat dari masih minimnya tamatan D3 akuntansi atau lebih tinggi. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi juga masih kurang terlihat dari belum semua SKPD menggunakan jaringan internet dan memanfaatkan sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi antar unit kerja.
2. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan..
3. Kapasitas sumber daya manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tapi juga keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Kapasitas sumber daya manusia dapat meningkat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mendukung. Kapasitas sumber daya manusia perlu didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi nilai keterandalan dan ketepatanwaktuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisa Setya Hapsari. 2008. *Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Audit BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)*.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Antara News. 2008. *Tenaga Keuangan dan Pembukuan Cukup Diploma-3*.
- Anugroho. 2008. *Sumber Daya Manusia*. Erlangga : Jakarta
- Anggraini, Murni. 2006. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*. Tesis: Semarang
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 2006. *BPK Ungkap 10 Kelemahan Laporan Keuangan Pemerintah*. info@apkasi.or.id
- BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007. www.bpk.com
- Dharma. 2002. *Berbagai Aspek Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat : Jakarta
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Merian Aceh. Rabu, 20 Mei 2009. *Laporan Keuangan Pemda Buruk, Aceh Tengah Satu-satunya Daerah Berpredikat WTP*.
- Merian Bisnis Indonesia. 2007. *Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas*.